



Judul : KPK Dalami Bukti Aliran Dana dari Korupsi E-KTP
Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP

KPK Dalami Bukti Aliran Dana dari Korupsi E-KTP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti aliran dana hasil dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke sejumlah pihak, termasuk anggota dan mantan anggota DPR.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, kemarin penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

Lima saksi diperiksa untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan e-KTP yang juga Direktur Pengeleolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Sugiharto. Dari lima saksi untuk Sugiharto, hanya Ade Komaruddin (anggota Komisi IX DPR), Chairuman Harahap (Ketua Komisi II DPR 2010-2012 dari Fraksi Partai Golkar), dan Paultar P Sinambela (Kepala Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor BPN Jakarta Selatan) yang hadir.

Dua saksi lainnya, yakni anggota Komisi VII DPR Tamsil Linrung serta anggota Komisi II DPR 2009-2014 Yasonna Hamonangan Laoly, tidak hadir.

Adapun satu saksi lagi diperiksa untuk tersangka mantan Dirjen Dukcapil yang kini menjabat sebagai staf ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik (non-aktif) Irman.

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap anggota DPR maupun mantan anggota DPR baik yang sudah diperiksa atau diperiksa dan dijadwalkan kemarin punya tujuan khusus. Salah satunya KPK sedang berupaya memvalidkan bukti-bukti, data-data, dan informasi yang ditemukan penyidik terkait dugaan aliran dana dan penerima dana hasil korupsi proyek e-KTP dari unsur anggota maupun mantan anggota DPR.

“Memang kami mendalami ke mantan anggota dan anggota DPR tentang proses pembahasan anggaran di DPR, bukan hanya proses formal

tapi proses lain. Juga kami mendalami indikasi aliran dana, termasuk aliran dana ke sejumlah anggota DPR pada kasus e-KTP yang dua tersangka sudah ditetapkan,” papar Febri di Jakarta, kemarin.

Ade Komaruddin (Akom) kemarin menjalani pemeriksaan perdananya sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Akom mengaku pemeriksaan kemarin dalam kapasitasnya selaku anggota DPR 2009-2014 dalam posisi sebagai anggota Fraksi Partai Golkar dan anggota Komisi XI serta selaku sekretaris Fraksi Partai Golkar saat itu.

Disinggung soal apa yang diketahui mengenai proyek e-KTP, Akom berkali-kali mengelak. Dia mempersilakan para awak media mengonfirmasi langsung kepada penyidik. “Tanya penyidik jangan tanya saya,” ujarnya. Dia pun mengaku tidak mengetahui ada aliran dana ke sejumlah anggota DPR. “Yah kan saya tidak tahu, saya sudah sampaikan semua yang saya tahu. Tapi kalau urusan aliran dana begitu, saya tidak tahu,” ungkapnya.

• **sabir lalu hu**